



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 September 2018

Halaman: 19

Media: Harian Jogja
Hari: Sabtu
Tanggal: 29 September 2018
Halaman: 19

PEMERATAAN PENDIDIKAN

Ada Sekolah Inklusi Menolak Murid Difabel

JOGJA—Direktur Dria Manunggal sekaligus Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yogyakarta, Setia Adi Purwanta menjelaskan ada beberapa sekolah di DIY yang diberi label sebagai sekolah inklusi tetapi justru menolak murid difabel.

Hal ini disampaikan Setia dalam lokakarya *Mendorong Kerja-Kerja Pemberitaan yang Berpihak pada Kelompok Rentan Bagi Jurnalis di Yogyakarta*, Kamis (27/9).

Pada dasarnya, sekolah inklusi merupakan institusi pendidikan regular (biasa) yang menerima anak kebutuhan khusus (ABK) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana.

"Ada sekolah yang diberi label sekolah inklusi tetapi menolak murid, itu nyata. Banyak kasusnya dan tidak terungkap. Media konvensional jarang sekali mengungkap kasus itu," kata Setia.

Ada beberapa universitas menerima penyandang disabilitas. Namun sekolah setingkat SD, SMP masih sangat banyak yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja No.188/661 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Jogja Tahun 2014 tercatat sebanyak 57 sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang resmi menjadi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPP) Kota Jogja.

Keberadaan SK Sekolah Inklusi ini menjadi dalih bagi sekolah lain untuk tidak menerima anak penyandang disabilitas. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 yang berbunyi setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Setia menuturkan apabila hal semacam ini masih terjadi seharusnya sekolah tidak perlu menggunakan kata inklusi, mengajar hanya persoalan metodologi. Solusi yang paling sering ditawarkan atas peristiwa ini adalah untuk mengirim anak penyandang disabilitas ke SLB adalah bukan pilihan terbaik. (M17)

Positif Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005